

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan perekonomian dunia yang didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin maju telah membawa masyarakat ke arah masyarakat informasi, dimana kebutuhan akan peralatan telekomunikasi yang canggih semakin meningkat. Keadaan ini telah memacu para pelaku bisnis dan ekonomi harus dapat melakukan berbagai perubahan kegiatan ekonominya menjadi seefektif dan seefisien mungkin.

Pengaruh globalisasi juga memicu para pelaku bisnis dan ekonomi untuk melakukan berbagai tindakan agar bisnisnya tetap dapat bertahan di dunia bisnis agar tujuannya dapat tercapai maka kegiatan usahanya harus efektif dan efisien. Dalam perekonomian modern, manajemen dan pemilik perusahaan semakin nyata dipisahkan untuk kepentingan pengendalian. Pemisahan ini dapat menimbulkan adanya transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang teteap antara kepentingan-kepentingan yang ada misalnya antara pemegang saham dan manajemen.

Keadaan ekonomi Indonesia yang belum stabil membuat perusahaan semakin banyak bergantung pada modal eksternal untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan perusahaan. Agar memperoleh dana jangka panjang yang stabil, sistem perusahaan harus diakui secara internasional. Peraturan-peraturan dibuat untuk memberikan arahan dalam pengelolaan dan pengendalian perusahaan yang akan menjadikan

perusahaan lebih dipercaya dan diandalkan, baik di dalam negeri maupun dunia internasional.

Dalam hal ini pemerintah memiliki peranan yang penting untuk itu pemerintah memberlakukan peraturan yang memadai. Namun manajemen perusahaan memegang peran yang paling dominan dalam jalannya sebuah usaha untuk itu manajemen memegang tanggung jawab utama untuk melaksanakan sistem *Corporate Governance* yang baik di dalam perusahaan. Perusahaan harus semakin waspada terhadap pengawasan masyarakat semakin tajam terhadap tindakan pimpinan perusahaan.

Manusia merupakan pilar utama dalam membawa organisasi ke arah yang lebih baik atau bahkan sebaliknya. Setiap organisasi membutuhkan suatu pengendalian internal yang baik agar tujuan organisasi dan kepentingan-kepentingan *stakeholders* dapat tercapai secara optimal. Demi kepentingan mereka maka perusahaan perlu memastikan kepada pihak penyandang dana eksternal bahwa dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin dan memastikan bahwa manajemen melakukan yang terbaik untuk kepentingan perusahaan tanpa adanya benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi.

Menurut laporan *Corruption and Fraud in Internasional Aid and Business Projects* (W. Michael Kramer, IIA *Internasiona Conference*, Washington DC, Juni 2002) mengemukakan 10 negara terkorup dan Indonesia menduduki urutan ke empat sebagai *Most Corrupt Countries*. Selain itu menurut riset yang dilakukan oleh *Mckinsey and company* tentang praktik *Good Corporate Governance* di tujuh Negara Asia (Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Thailand, dan Indonesia) menetapkan Indonesia di posisi terbawah.

Hasil-hasil survei memberikan pertanda bahwa sudah saatnya organisasi dan perusahaan-perusahaan di Indonesia didorong untuk segera memperbaiki kualitas penerapan *Good Corporate Governancenya*. Dan kini telah terbentuk lembaga-lembaga yang mendorong penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia seperti *The Institute for Corporate Governance (IICG)*.

*Good Corporate Governancve (GCG)* sering diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Namun pada umumnya telah disepakati bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M/MBU/2002, tanggal 1 Agustus 2002) telah mencakup transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Setiap pedoman *Corporate Governance* tidak dimaksudkan untuk diterapkan pada setiap organisasi atau perusahaan hal ini dimaksudkan karena kebutuhan setiap perusahaan berbeda-beda dan setiap akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Setiap perusahaan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip yang ada untuk mengembangkan praktik-praktik *Corporate Governance* yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing.

Akuntan memiliki peranan yang penting terhadap peningkatan *Good Corporate Governance*. Salah satu aplikasi profesi akuntan dalam perusahaan adalah sebagai auditor internal, yang memiliki fungsi sebagai *compliance auditor* dan *internal business consultant* bagi perusahaan dituntut antara lain mampu memberikan nilai tambah untuk organisasinya dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance*.

Profesi audit internal mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu, keberadaannya untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai fungsi yang

independen dengan menciptakan sikap profesional dalam setiap aktivitasnya mendorong pihak terkait untuk terus melakukan pengkajian terhadap profesi ini.

Salah satu fungsi audit internal yaitu untuk menyediakan informasi mengenai kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian manajemen dan kualitas kinerja perusahaan bagi manajemen. Beberapa masalah kemudahan timbul berkaitan dengan fungsi audit internal, seberapa efektif keberadaan audit internal dalam memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Sistem pengendalian intern semakin menjadi tumpuan dalam mewujudkan organisasi yang sehat dan berhasil. Kewajiban untuk mengembangkan, menjaga, dan melaporkan system pengendalian intern merupakan ketentuan bagi instansi pemerintah dan BUMN/BUMD, Bank, Perusahaan Publik, maupun lembaga yang mendapat bantuan dari pemerintah.

Pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* ini di lingkungan BUMN, sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kinerja BUMN yang memiliki nilai asset yang demikian besar untuk mendukung pencapaian penerimaan/pendapatan negara, sekaligus menghapuskan berbagai bentuk praktek inefisiensi, korupsi, kolusi, nepotisme dan penyimpangan lainnya untuk memperkuat daya saing BUMN menghadapi pasar global. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan misi dan peran yang dimilikinya saat ini menghadapi tantangan kompetensi global dunia usaha yang semakin besar. BUMN diharapkan menaikan efisiensi sehingga menjadi unit usaha yang sehat dan memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan interaksinya dengan aspek-aspek kehidupan nasional. BUMN harus peka terhadap setiap perkembangan ilmu pengetahuan teknologi,

dan dunia usaha. Sehingga profesionalisme BUMN di segala bidang terus meningkat baik dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan maupun dalam bidang pengendalian dan pengawasan. Dikutip dari harian *KOMPAS.com* (*Jumat, 12 Desember, 2011*), Sebanyak sembilan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) meraih peringkat pertama dalam Malam Anugerah BUMN 2011. Beberapa di antaranya bahkan meraih lebih dari satu penghargaan.

“Penyelenggaraan Anugerah BUMN tahun ini merupakan yang kedua, setelah tahun lalu diselenggarakan dengan tema ‘Sinergi dan Transformasi untuk Memacu Kontribusi bagi Pembangunan Negeri’,” ucap Ketua Dewan Juri, Muhammad Said Didu, di acara Malam Anugerah BUMN 2011, di Jakarta, Kamis (1/12/2011) malam. Tahun ini, acara penghargaan kepada perusahaan-perusahaan BUMN bertajuk “Inovasi untuk Kinerja Unggul”.

Kali ini, ada 69 BUMN yang mengembalikan kuesioner. Dari jumlah tersebut, terpilih 53 BUMN yang melakukan persentasi di depan dewan juri. Penilaian pun terdiri dari empat tahap. Dimulai dari pengisian kuesioner hingga diadakannya sidang dewan juri. Sejumlah BUMN pun terpilih menjadi pemenang dalam 12 kategori.

### **Kategori Inovasi Manajemen BUMN Terbaik**

1. PT Pertamina (Persero)
2. PT BNI (Persero) Tbk
3. PT Bukit Asam (Persero) Tbk

**Kategori Inovasi GCG BUMN Terbaik**

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2. PT Jasa Marga (Persero) Tbk
3. PT Pertamina (Persero)

**Kategori Inovasi Produk Manufaktur BUMN Terbaik**

1. PT PINDAD (Persero)
2. PT Biofarma (Persero)
3. PT INTI (Persero)
4. PT ASABRI (Persero)

**Kategori Inovasi Produk Agrikultur BUMN Terbaik**

1. PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)
2. PT Sang Hyang Seri (Persero)
3. Perum Perhutani (Persero)

**Kategori Inovasi Produk Jasa BUMN Terbaik**

1. PT PLN (Persero)
2. PT POS Indonesia (Persero)
3. Perum Pegadaian (Persero)

**Kategori Inovasi Teknologi BUMN Terbaik**

1. PT Biofarma (Persero)
2. PT BNI (Persero)
3. PT PP (Persero) Tbk

**Kategori Inovasi Pemasaran BUMN Terbaik**

1. PT BNI (Persero) Tbk
2. PT Telkom (Persero) Tbk
3. Perum Pegadaian

**Kategori Inovasi SDM BUMN Terbaik**

1. PT Pupuk Kaltim
2. PT Telkom (Persero) Tbk
3. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

**Kategori Inovasi PKBL BUMN Terbaik**

1. PT BNI (Persero) Tbk
2. PT Telkom (Persero) Tbk
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

**Kategori Inovasi Pelayanan Publik BUMN Terbaik**

1. PT PLN (Persero)
2. PT KAI (Persero)
3. PT Pupuk Kaltim

**Kategori Inovasi Strategi Bisnis Global BUMN Terbaik**

1. PT Biofarma (Persero)
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
3. PT Pertamina (Persero)

Dari semua kategori ini, BUMN yang terpilih menjadi *best of the best* adalah PT BNI (Persero) Tbk. Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo menerima langsung penghargaan ini. Sementara itu, RJ Lino dari PT Pelindo II (Persero) Tbk terpilih menjadi CEO BUMN inovatif terbaik.

Terhadap pemilihan pemenang ini, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebutkan, penilaian dilakukan secara independen. “Malam ini saya agak terlambat karena saya minta jaminan bahwa penilaian malam ini independen atau ada titipan-titipan. Kemudian ada jaminan dari Pak Tanri Abeng (sebagai salah satu anggota dewan juri) bahwa ini independen, ok. Berarti nanti direktur utama BUMN yang tadi menang inovasi manajemen, misalnya, tentu akan diuji pada kehidupan sehari-hari karena pasti akan diundang oleh banyak BUMN yang lain,” sebut Dahlan.

Menurut dia, Dirut BUMN pemenang penghargaan biasanya diundang untuk menceritakan pengalamannya dalam memimpin BUMN.

PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (persero), selanjutnya disingkat dengan PT. ASABRI, berkomitmen untuk menerapkan praktik-praktik GCG dalam pengelolaan perusahaan sehari-hari. Komitmen tersebut diwujudkan antara lain dengan membuat infra struktur GCG yang melandasi penerapan GCG di lingkungan perusahaan, diantaranya adalah dengan penyusunan Pedoman *Corporate Governance (Code of Corporate Governance)* PT ASABRI. Pedoman ini menjadi acuan bagi organ perusahaan dalam menerapkan praktik-praktik *Good Corporate Governance* di lingkungan perusahaan. Keberhasilan implementasi Pedoman *Corporate Governance* ini sangat tergantung pada komitmen dari pimpinan tertinggi perusahaan dalam menegakkan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dengan didukung oleh seluruh jajaran perusahaan.

Dilakukan penelitian untuk mengetahui fungsi profesi ini berpengaruh secara luas dalam meningkatkan *Good Corporate Governance* pada banyak perusahaan, yang kini sudah menjadi tuntutan masyarakat luas. Berdasarkan latar belakang

tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai: **“Pengaruh Audit Internal terhadap Penerapan Prinsip - Prinsip *Good Corporate Governance* (Studi kasus pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) ( Jl. Citarum, No. 6 Bandung)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut penulis mengidentifikasi masalah yang diteliti adalah:

1. Apakah audit internal pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah memadai.
2. Apakah *Good Corporate Governance* pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah diterapkan dengan baik.
3. Apakah audit internal yang memadai dapat berpengaruh terhadap peningkatan *Good Corporate Governance* pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan mengenai audit internal, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh audit internal terhadap peningkatan *Good Corporate Governance*.

Sesuai dengan masalah-masalah yang diidentifikasi, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan pengaruh audit internal di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

2. Untuk mengetahui penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* yang diterapkan oleh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh dan peningkatan audit internal terhadap peningkatan *Good Corporate Governance* pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Pengembangan Ilmu
  - a. Penelitian ini akan berguna untuk melatih diri dan menganalisa suatu permasalahan secara ilmiah dan sistematis dalam bentuk penulisan skripsi.
  - b. Bagi peneliti lain dan pihak-pihak yang memerlukan dapat digunakan sebagai sumber referensi dari informasi yang juga dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.
2. Pengembangan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bagi perusahaan dapat memperluas wawasan manajemen akan perlunya sistem *Corporate Governance* dan sebagai bahan pertimbangan, jika perlu dapat dipakai untuk mengadakan perbaikan agar dapat meningkatkan nilai perusahaan.

#### **1.5 Rerangka Pemikiran**

*Good Corporate Governance* diartikan secara sempit sebagai pertanggungjawaban resmi direksi kepada pemegang saham. Sementara itu secara luas diartikan sebagai sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai

pemegang saham (*stakeholders value*) serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (2001:3) pengertian *Corporate Governance* adalah :

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi semua pihak pemegang kepentingan”.

Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) (Juli 2000) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai berikut: “*Good Corporate Governance* adalah suatu sistem bagaimana suatu perusahaan dijalankan dan diawasi”.

*Good Corporate Governance* juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan atas kinerja *Good Corporate* yang baik dapat memberikan perangsangan atau insentif yang baik bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan harus memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang efisien. Untuk meningkatkan *Corporate Governance* yang baik harus melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang pada dasarnya terdapat lima prinsip utama yaitu *fairness, transparency, independency, accountability, dan responsibility*.

*Fairness* adalah prinsip yang memberikan pengakuan yang sama terhadap semua pemegang saham maupun investor. *Transparency* maksudnya agar dalam

mengelola perusahaan, manajemen mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material kepada pemegang saham investor. *Independency* yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. *Accountability* maksudnya setiap langkah yang diambil manajemen dalam mengelola perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan sedangkan *Responsibility* adalah kesesuaian di dalam mengelola perusahaan terhadap peraturan perundang-undangnya yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Kewajiban anggota direksi, komisaris atau dewan pengawas untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* saat ini sudah sewajarnya dan tidak berlebihan. Dalam meningkatkan *Good Corporate Governance* itu sendiri ternyata sangat membutuhkan peran akuntan perusahaan, baik dari peran akuntan manajemen maupun auditor internal.

Auditor internal bertugas meneliti dan mengevaluasi bekerjanya sistem akuntansi disamping meneliti seberapa jauh kebijakan dan program kerja manajemen dijalankan. Audit internal sebagai salah satu profesi yang menunjang komponen utama dalam meningkatkan pengelolaan yang sehat.

Tanpa fungsi audit internal, dewan direksi atau pimpinan unit tidak memiliki sumber informasi internal yang bebas mengenai kinerja organisasi, mengingat pengertian audit internal yang ditetapkan oleh *IIA'S Board of Directors* pada bulan Juni 1999 adalah:

*“Internal auditing is an independent, objectives assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operation. It helps an organization accomplish its abjectives by bringing a systematic, disclined approach to avaluate and improve the effectiveness of risk management, contol and governance process.”*

Pengertian di atas dapat diartikan bahwa audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independent dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance*.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh R.Cherrya Angelik Kathlia dengan judul **Fungsi Audit Internal dalam Meningkatkan *Good Corporate Governance*** (Studi kasus pada PT Pos Indonesia) dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan menyimpulkan bahwa pelaksanaan audit internal pada PT Pos Indonesia sudah memadai pelaksanaan GCG pada PT Pos Indonesia juga telah terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan ternyata ada pengaruh yang kuat antara audit internal terhadap peningkatan *Good Corporate Governance*. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Objek yang diteliti adalah PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) Bandung.

Hipotesis yang penulis kemukakan adalah **“Pengaruh Audit Internal terhadap Penerapan Prinsip - Prinsip *Good Corporate Governance*.”**

## **1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penulis melakukan penelitian pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) yang berlokasi di Jl. Citarum No.6 Bandung. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan Februari 2012 sampai dengan Maret 2012.